

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari beberapa sub bab yang menjelaskan tentang topik yang diteliti termasuk latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

1.1 Latar Belakang

Inspektorat Kota Padang adalah badan pengawasan yang bertugas mengawasi pelaksanaan pemerintahan daerah di bawah kepemimpinan seorang Inspektur yang langsung bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Kantor Inspektorat Kota Padang berlokasi di Jl.Sawahan No 50 Sawahan Timur Kecamatan Padang Timur Kota Padang Sumatera Barat dan saat ini memiliki 76 pegawai termasuk Inspektur Sekretaris Bagian Umum, Bagian Keuangan, Evaluasi Pelaporan, dan Inspektur Pembantu. Inspektorat Kota Padang merupakan instansi pengawas internal pada pemerintahan Kota Padang yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk membantu Wali Kota Padang dalam bidang audit dan pengawasan. Dalam ketentuan Peraturan Kementerian Dalam Negeri nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembangunan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 dijelaskan enam aspek fokus pengawasan. Keenam aspek tersebut meliputi pemeriksaan atau audit kinerja, pemeriksaan atau audit dengan tujuan tertentu, pengawasan wajib, pemantauan pelaksanaan reformasi birokrasi, penegakan integritas, dan peningkatan kapasitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP). Inspektorat Kota Padang, sebagai badan audit internal, melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Padang.

Salah satu tanggung jawab utama Inspektorat Kota Padang sebagai badan audit internal adalah mengawasi pelaporan MCP dalam upaya pencegahan korupsi di Kota Padang. Saat ini, Inspektorat Kota Padang belum memiliki sistem sendiri untuk mengawasi pelaporan MCP, proses *monitoring* tersebut masih dilakukan melalui *website* KPK, yaitu Jaga.id. Namun, *website* tersebut memiliki keterbatasan dalam hak akses sehingga OPD tidak bisa melakukan *upload* data

dukung secara mandiri, saat ini, OPD masih harus mengirimkan dokumen tersebut kepada pihak Inspektorat secara manual yaitu datang ke kantor Inspektorat langsung maupun melalui *Email*, dan *WhatsApp*. Admin akan mengupload dokumen yang dikirim tiap OPD ke *website* Jaga.id. Kondisi tersebut menyebabkan pengelolaan dokumen tidak terstruktur, yang dapat meningkatkan risiko kehilangan maupun kerusakan dokumen, serta menghambat pemantauan progres pelaksanaan MCP. Selain itu, proses penginputan dokumen yang masih sepenuhnya dilakukan oleh satu admin, menyebabkan tingginya beban kerja admin.

Setelah dokumen diupload ke *website* Jaga.id, admin akan memeriksa dokumen untuk memastikan bahwa laporan tersebut sesuai dengan penilaian yang telah ditetapkan. Kemudian admin akan memberikan verifikasi penilaian apabila dokumen telah memenuhi indikator penilaian. Namun, jika laporan tersebut tidak sesuai indikator penilaian, admin akan memberikan catatan kepada OPD terkait untuk melengkapi dokumennya. Proses penilaian pada *website* Jaga.id juga masih dilakukan manual, admin harus menghitung sendiri nilai yang akan diberikan berdasarkan nilai yang ada di pedoman Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) MCP. Hal ini kurang efektif karena dapat berpotensi *human error* dalam perhitungan nilai.

Permasalahan serupa tentang kurangnya efektivitas dan efisiensi yang dihadapi oleh Inspektorat Kota Padang dalam memantau pelaporan MCP, terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang juga memiliki permasalahan yang relevan. Salah satunya yaitu artikel yang diteliti oleh Suleman & Pakaya (2024), penelitian tersebut mengkaji terkait proses pencatatan data audit, penyusunan rekomendasi, dan pemantauan tindak lanjut hasil yang mengalami keterlambatan dikarenakan sistem yang tidak berfungsi dengan baik. Solusi yang ditawarkan berupa pembuatan Sistem Informasi Pengawasan dan Pelaporan Berbasis Teknologi.

Penelitian lain yang relevan diteliti oleh Hartanto et al. (2024), penelitian tersebut mengidentifikasi bahwa pelaksanaan MCP masih menghadapi beberapa hambatan yang berdampak pada kelancaran proses pelaporan. Pada tingkat internal. KPK mengalami keterbatasan sumber daya manusia, serta ketidaklengkapan dokumen yang dikirimkan oleh OPD. Sementara pada tingkat

eksternal, OPD menghadapi tantangan seperti keterbatasan kualitas dan jumlah SDM, kurangnya anggaran, kendala infrastruktur teknologi, hambatan geografis, hingga perbedaan persepsi mengenai dokumen yang diperlukan untuk memenuhi standar pelaporan MCP. Dari permasalahan tersebut, menunjukkan bahwa proses pelaporan dan verifikasi MCP masih memerlukan penguatan baik dari lembaga pemerintahan maupun dari sistem pendukungnya.

Berdasarkan kedua penelitian sebelumnya, solusi yang diusulkan adalah pembangunan Sistem Informasi *Monitoring Center for Prevention* berbasis *website*. Sistem ini akan membantu dalam memantau laporan OPD secara transparan, dan memiliki fitur untuk menindaklanjuti laporan yang telah dikirim oleh OPD. Sistem ini dirancang agar pemantauan terhadap OPD dalam upaya pencegahan korupsi di Kota Padang dapat ditindaklanjuti lebih cepat.

Untuk penelitian ini, terdapat beberapa metode pengembangan sistem yang menjadi alternatif untuk dijalankan seperti metode *Waterfall*, *Scrum*, dan *RAD*. Setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wahid (2020), metode *Waterfall* memiliki kelebihan yaitu metode *Waterfall* memastikan kualitas sistem yang baik karena pengembangan dilakukan secara bertahap dan terorganisir, mengurangi kesalahan, dan menghasilkan dokumentasi yang lengkap di setiap tahap. Namun juga memiliki kekurangan yaitu waktu yang lama dan biaya yang tinggi, metode *Waterfall* juga memerlukan manajemen yang baik karena prosesnya tidak dapat diulang, dan kesalahan kecil di awal proses dapat berdampak besar pada tahap berikutnya. Selain itu, urutan pengembangan sering tidak berjalan sekuensial dalam praktiknya, sehingga iterasi dapat menyebabkan masalah baru.

Berdasarkan analisis setiap metode yang akan digunakan, metode *Waterfall* dipilih karena kebutuhan Sistem Informasi MCP yang terstruktur dan memerlukan dokumentasi lengkap. Metode *waterfall* memungkinkan pengembangan yang terorganisir, risiko yang minimal, dan hasil akhir yang mendukung pengawasan kinerja OPD yang efektif. Dengan demikian pembangunan Sistem Informasi *Monitoring Center for Prevention* berbasis

website memungkinkan pemantauan secara *real-time* terhadap implementasi langkah-langkah pencegahan korupsi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian ini yaitu, bagaimana membangun Sistem Informasi *Monitoring Center For Prevention (SI-MCP)* yang dapat membantu Inspektorat Kota Padang dalam memantau upaya pencegahan korupsi di Kota Padang secara efektif dan efisien?

1.3 Batasan Masalah

Dalam pembangunan Sistem Informasi *Monitoring Center for Prevention (SI-MCP)* terdapat beberapa batasan masalah yang meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

1. Sistem yang dibangun berbasis *web* dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman PHP, *database* MySQL, *code editor* Visual Studio Code, server XAMPP, dan *framework* Laravel.
2. Sistem informasi yang akan dibangun hanya digunakan oleh Inspektorat Kota Padang dan OPD yang ada di Kota Padang.
3. Sistem yang akan dibangun akan diuji menggunakan *black box testing* dan *unit testing*.
4. Fitur yang digunakan meliputi upload indikator, aspek, rencana aksi, dokumen, bukti dokumen, verifikasi, dan kelola akun.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Membangun sistem informasi berbasis web yang dapat mengefisiensikan proses pemantauan dan pengelolaan dokumen pendukung.
2. Meningkatkan transparansi dalam pelaksanaan MCP.
3. Mengurangi beban kerja Admin Pemko Padang melalui fitur upload data secara mandiri oleh OPD dan fitur penilaian yang menjadi kategori sehingga admin tidak perlu menghitung secara manual.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Meningkatkan efisiensi proses *monitoring* dalam upaya pencegahan korupsi di Kota Padang.
2. Memudahkan OPD dalam mengunggah dokumen melalui sistem secara langsung.
3. Mengurangi beban kerja Admin Pemko Padang dengan adanya fitur perhitungan otomatis, sehingga meminimalisir *human error*.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan proposal ini dibagi atas 6 bab yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari beberapa sub bab yang menjelaskan tentang topik yang diteliti termasuk latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memaparkan tentang profil organisasi, metode pengembangan sistem, dan kajian literatur yang mencakup teori dasar maupun teori pendukung yang relevan dengan sistem informasi pada penelitian ini. Semua pembahasan dalam bab ini dimaksudkan untuk memperkuat landasan konseptual untuk merancang solusi yang ditawarkan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini memaparkan tentang *flowchart* penelitian berdasarkan tiap tahapan yang terdapat dalam *flowchart*, yang mengkaji tentang identifikasi masalah, studi literatur, pengumpulan data, analisis dokumen, dan metode pengembangan sistem.

BAB IV : ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

Bab ini memaparkan tentang analisis dokumen dan analisis masalah yang ditemukan, serta perancangan sistem yang menjadi solusi dengan menggunakan tools seperti *Business Process Model Notation* (BPMN), *use case diagram*, *activity diagram*, *sequence diagram*, *class diagram*, perancangan *database*, struktur *database*, dan perancangan antarmuka.

BAB V : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM

Bab ini berisi tentang proses mengimplementasikan rancangan ke dalam bahasa pemrograman berdasarkan analisis dan perancangan, serta pengujian sistem

terhadap hasil implementasi sistem. Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa sistem telah memenuhi kebutuhan yang ditetapkan sebelumnya.

BAB VI : PENUTUP

Bab VI ini berisi kesimpulan berdasarkan hasil penelitian serta saran untuk pengembangan sistem kedepannya.

